

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 007.4/HM.00.01/K.NT/02/2022

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur, maka dipandang perlu melakukan pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur tersebut perlu disusun dalam bentuk daftar informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Menetapkan KESATU KEDUA Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11471);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur tentang penetapan daftar informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur.

KESATU Menetapkan daftar informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

KEDUA

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kupang
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
					HARDCOPY	SOFTCOPY	
A. INFORMASI WAJIB BERKALA							
I. INFORMASI BERKAITAN DENGAN PROFIL BAWASLU							
1	Alamat Lengkap	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Visi dan Misi	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	Tugas dan Fungsi	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Sejarah Pengawasan Pemilu	Bagian Humas	Bagian Humas	2020		✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Struktur Organisasi	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Profil Pimpinan Bawaslu Prov. NTT Periode 2018 - 2023	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Profil Singkat Kepala Sekretariat	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Dasar Hukum	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	Sarana Layanan	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

II. PENGAWASAN							
2	BKU IKP 2019	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	Data hasil pemungutan dan perhitungan suara 2018	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Hasil Pengawasan kampanye pemilihan Gubernur, Bupati & Wakil Bupati	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Hasil pengawasan penyampaian dan gambaran laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pemilihan umum 2019	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih kepala daerah tahun 2018	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Laporan akhir pengawasan PILBUP 2015	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Laporan akhir pelaksanaan tahapan kampanye 2019	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	Laporan akhir kampanye 2018	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
10	Layout panduan pojok pengawasan	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
11	Laporan pengawasan provinsi 2019	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
12	Panduan gerakan pengawasan partisipatif pemilu	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
III. PENANGANAN PELANGGARAN							
1	Panduan pusat pengawasan partisipatif	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Data penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi NTT dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	Data keseluruhan penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

4	Data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati & Wakil Bupati pada pilkada 2018	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Putusan pendahuluan Nomor : 01/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Putusan akhir Nomor : 001/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Putusan Nomor : 001/ADM/BAWASLU-KAB.KUPANG/PEMILU/XII/2018	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Data penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur pada pilkada tahun 2018	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	Putusan akhir Nomor : 001/ADM/BAWASLU.TTU/PEMILU/2019	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
10	Putusan akhir Nomor : 001/PTS-ADM/BAWASLU-MGR/PEMILU/2018	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
11	Putusan akhir Nomor : 001/ADM/BWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
12	Putusan akhir Nomor : 001/ADM/BWSL PROV. NTT/PEMILU/V/2018	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
13	Kode etik,Administrasi dan Hukum	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
14	Putusan pendahuluan Nomor : 001/ADM/BWSL PROV. NTT/PEMILU/V/2018	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
15	Penanganan tindak pidana pemillihan	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
16	Data penanganan pelanggaran tahun 2020	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
17	Prosedur laporan pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
IV. INFORMASI KEGIATAN DAN KINERJA BAWASLU NTT							
1	Laporan Keuangan Tahun 2020	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

2	Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2021	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	TimeLine 2021 Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi	Bagian Humas	Bagian Humas	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Laporan PPID Provinsi NTT 2020	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Laporan PPID 22 Kab/Kota provinsi NTT 2020	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Rekapan Sengketa Provinsi NTT 2019	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Laporan Komperhensif 2021 Provinsi NTT	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Laporan Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	Bagian Humas	Bagian Humas	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

B. INFORMASI WAJIB SERTA MERTA

I. PENANGANAN PELANGGARAN

1	Alur Penanganan Pelanggaran PEMILU	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Alur Penanganan Pelanggaran PEMILIHAN	Bagian Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

II. SENGKETA PROSES PEMILU

1	Alur Penyelesaian Sengketa Antar Peserta	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Alur Penyelesaian Sengketa PEMILIHAN	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	Putusan Adjudikasi Kab. Manggarai Sengketa PKB	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Putusan Adjudikasi Kab. Alor Sengketa BERKARYA	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

5	Putusan Adjudikasi Kab. Ngada Sengketa PKPI	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Putusan Adjudikasi Kab. Alor Sengketa PBB	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Putusan Adjudikasi Kab. Kupang Sengketa BERKARYA	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Putusan Adjudikasi Kab. Ende Sengketa BERKARYA	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	Putusan Adjudikasi Kab. Manggarai Barat Sengketa PAN	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
10	Putusan Adjudikasi Kab. Flotim Sengketa Demokrat	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
11	Putusan Adjudikasi Kab. Flotim Sengketa PAN	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
12	Putusan Adjudikasi Kab. Sumba Timur Sengketa GARUDA	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
13	Putusan Adjudikasi Kab. Rote Ndao Sengketa BERKARYA	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
14	Putusan Adjudikasi Kab. Rote Ndao Sengketa PKS	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
15	Putusan Adjudikasi Kab. Alor Sengketa PSI	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
16	Putusan Adjudikasi Kab. Rote Ndao Sengketa PAN	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
17	Putusan Adjudikasi Kab. Alor Sengketa PSI Hasil Koreksi Bawaslu RI	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
18	Putusan Kesepakatan BERKARYA Provinsi NTT	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
19	Putusan Kesepakatan GERINDA Manggarai	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
20	Putusan Sengketa Mediasi BERKARYA NTT	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

21	Putusan Kesepakatan HANURA Sumba Timur	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
22	Putusan Adjudikasi Kab. Rote Ndao Sengketa HANURA	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
23	Sengketa GARUDA Provinsi NTT	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
24	Sengketa PKS Provinsi NTT	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
III. KEUANGAN							
1	DIPA T.A. 2019	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	DIPA T.A. 2020	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	DIPA T.A. 2021	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Laporan Realisasi Anggaran 2020	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Kepsekjen 0343-2019 - Pedoman Keuangan APBN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Neraca Tahun 2020	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor 0239	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
IV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI							
1	Surat Perjanjian Pihak Ke Tiga	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	LBMN Tahunan 2020	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	LBMN Tahunan SM I 2021	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

4	CHR NTT 2020	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Data Daftar Nama Komisioner dan Pegawai BAWASLU NTT	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Pengumuman - Kab / Kota - Gelombang II	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Bawaslu Dalam Angka Pilkada Serentak 2018	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Action Plan RB Bawaslu Tahun 2018	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	Apa Dan Siapa BAWASLU RI	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
10	Buku Pembiayaan Pemilu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
11	Infografis Bawaslu Kabupaten Kota 2018-2023	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
12	JUKLAK Evaluasi LAKIP	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
13	Juknis dan SOP Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Atau RDLK Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
14	Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2010	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
15	Layout BAWASLU Mendengar	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
16	Panduan Saka Layout	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
17	Pedoman Pengelolaan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2013	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
18	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Honorar BAWASLU	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
19	Pedoman Tata Naskah Dinas Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

20	Pedoman Tata Tertib Pegawai Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
21	Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
22	Roadmap RB 2020-2024	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
23	Serial Buku Pengawasan Partisipatif Agama Protestan	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
24	SK Ketua BAWASLU NO. 0883 - Pembentuka Panwas Kecamatan	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
25	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
26	SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
27	SOP Persuratan dan Arsip	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
28	SOP Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
V. Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten - Kota							
1	BAB I Pedoman Pembentukan TIMSEL	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	BAB II Tahapan Seleksi	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	BAB III Uji Kelayakan Dan Kepatutan	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Lampiran BAB I	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Lampiran BAB II	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Lampiran BAB III	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

7	SK - Pedoman Pembentukan BAWASLU Kab/Kota	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Timeline Pembentukan BAWASLU Kab/Kota	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

I. INFORMASI MENGENAI ORGANISASI

1	Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Panduan Pojok Pengawasan	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	Pedoman Pengelolaan Organisasi	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Honorar	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2013	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	Pedoman Tata Naskah Dinas	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Pedoman Tata Tertib Pegawai	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	SK Pedoman Pembentukan Bawaslu Kab-Kota	Bagian Pengawasan	Bagian Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

II. INFORMASI MENGENAI ADMINISTRASI

1	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Atas Unit Kerja di Lingkungan Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Juknis dan SOP Tata Cara Pengawasan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Atau Rapat Di Luar Kantor	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

3	Juknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan Rapat	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	SOP Penatausahaan Barang Milik Negara	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	SOP Pengumuman Lelang Dan Penerimaan Dokumen Penawaran	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	SOP Persuratan dan Arsip	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
III. INFORMASI MENGENAI KEUANGAN							
1	Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2015	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	Pedoman Pengelolaan Keuangan	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	Pedoman Perjalanan Dinas	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
4	Pedoman Pengelolaan Keuangan	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2019	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	SOP Mekanisme Penggunaan Anggaran	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
IV. INFORMASI MENGENAI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK							
1	SK PPID Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020	Bagian Humas	Bagian Humas	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
2	SK PPID Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	Bagian Humas	Bagian Humas	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
3	SOP Klasifikasi Informasi	Bagian Humas	Bagian Humas	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip

4	SOP Pelayanan Informasi	Bagian Humas	Bagian Humas	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
5	SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu	Bagian Humas	Bagian Humas	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
6	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Bagian Humas	Bagian Humas	2014	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
7	SOP Penangan Sengketa Informasi	Bagian Humas	Bagian Humas	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
8	Perkin Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Tahun 2021	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
9	Perkin Kabag Administrasi Tahun 2021	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
10	Perkin Kabag Pengawasan Tahun 2021	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
11	Perkin Kabag Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Tahun 2021	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2021	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
12	Rencana Strategis (RENSTRA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024	Bagian SDM dan Organisasi	Bagian SDM dan Organisasi	2020	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
13	Alur Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip
14	Rancangan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu	Bagian Penyelesaian Sengketa	Bagian Penyelesaian Sengketa	2017	✓	✓	Sesuai dengan retensi arsip